

**PENGARUH JUMLAH PENGANGGURAN, INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN PDRB TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
DI KABUPATEN LABUHANBATU**

SKRIPSI

Oleh:

**RAPIDAH AZMI
NIM 51151012**

Program Studi
EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**PENGARUH JUMLAH PENGANGGURAN, INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN PDRB TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
DI KABUPATEN LABUHANBATU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Oleh:

RAPIDAH AZMI

NIM.51151012

Program Studi

EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rapidah Azmi
Nim : 51151012
Tempat/Tgl lahir : Negeri Lama, 07 November 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Pembangunan Negeri Lama Kabupaten Labuhanbatu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Jumlah Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Labuhanbatu” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 19 Juli 2019

Yang membuat pernyataan

Rapidah Azmi

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

PENGARUH JUMLAH PENGANGGURAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PDRB TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN LABUHANBATU

Oleh :
RAPIDAH AZMI
NIM : 51151012

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 19 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Marliyah, M.Ag
NIP.197601262003122003

Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.SI
NIB. 1100000093

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Dr. Marliyah, M.Ag
NIP.197601262003122003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PENGARUH JUMLAH PENGANGGURAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PDRB TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN LABUHANBATU**” an. Rapidah Azmi, NIM 51151012 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 01 Agustus 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 09 Agustus 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam UIN-

SU

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Marliyah, M.Ag
NIP.197601262003122003

Imsar, M.Si
NIP.198703032045031004

Anggota

1. Dr. Marliyah, M.Ag
NIP.197601262003122003

2. Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si
NIP.1100000093

3. Kusmilawaty, SE, M.Ak
NIP.198006142015032001

4. Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, MA
NIP.196506282003021001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, M.A
NIP.197605072006041002

ABSTRAK

Rapidah Azmi, 2019. Pengaruh Jumlah Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu. Di Bawah Bimbingan Skripsi Pembimbing I Ibu Dr. Marliyah, M.Ag dan Pembimbing II Bapak Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.SI.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh langsung dari Badan Pusat Statistik dan dinas instansi terkait. Analisis yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif dengan model analisis linier berganda. Variabel yang digunakan Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB dan Tingkat Kemiskinan. Dalam penelitian ini menggunakan Software Eviews 8 sebagai alat estimasi. Hasil regresi menunjukkan bahwa Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Dimana setiap kenaikan 1 persen jumlah pengangguran mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan sebesar 5,62 persen Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Dimana setiap kenaikan 1 persen jumlah Indeks Pembangunan Manusia maka akan mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan sebesar 3,78 persen PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Dimana setiap kenaikan 1 persen maka akan mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 0,54 persen. Kemudian adanya hubungan antara Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan sebesar 78,13% dan 21,87% lainnya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disebutkan dalam model ini.

Kata Kunci : Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, Kemiskinan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur disampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua yang penuh dengan kekhilafan dalam bertindak dan berpikir. Sholawat dan salam diutarakan kepada baginda Nabi Muhammad Saw beserta dengan keluarga dan para sahabatnya. Semoga di hari akhir kelak kita semuanya sebagai umatnya mendapatkan siraman syafa'atnya di yaumul akhir kelak.

Terucap rasa syukur yang teramat karena penulis bersyukur bisa menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul “Pengaruh Jumlah Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu” dengan lancar tanpa memiliki kesulitan berarti.

Dalam penulisan skripsi ini disadari begitu banyak pertolongan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Sebab tanpa adanya pertolongan tersebut tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat sesuai dengan waktunya. Oleh karenanya, penulis pun menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Teruntuk yang paling istimewa kepada Ayah penulis Ahmad Fadhil SE, Ibu penulis Herlina Siregar, Abang Penulis Haris Fazila, Adik Penulis Yusmanizar, Rizky Abdillah dan Rapika Rahmah serta keluarga besar dari ayah penulis dan ibu penulis yang telah melimpahkan segala dukungan dan doa hingga sampai sejauh ini untuk penulis mendapatkan gelar sarjana.
2. Prof. Dr. H. Saidurrahman Harahap, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara dan Wakil Dekan I,II,III.

4. Dr. Marliyah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
5. Dr. Marliyah, M.Ag dan Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan II yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam membina penulis untuk menyusun skripsi ini.
6. Dr. Isnaini Harahap, MA selaku penasehat Akademik yang turut berperan dalam membantu penulis untuk penyusunan proposal skripsi.
7. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang juga telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mendidik penulis menjadi mahasiswa yang memiliki pendirian dan mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat kepada orang-orang yang belum mengetahui mengenai Ekonomi Islam.
8. Teruntuk Keluarga besar kelas Ekonomi Islam-B angkatan 2015.
9. Teruntuk sahabat dari kecil penulis Mbak Tuti Sundari.
10. Teruntuk kak Urpida Aini Nasution yang selalu membantu dari awal penelitian sampai akhir penelitian skripsi.
11. Teruntuk sahabat suka duka penulis Rani Andika dan Ahmad Irham.
12. Teruntuk sahabat SMA penulis Sri Ramadhani, Tuti Sundari, Zubaidah, Syafrida Agustin dan Siti Lestari yang selalu memberikan support dan doa dari kejauhan.
13. Teruntuk temen sekamar kost penulis Ayu lestari yang selalu memberikan support terbesarnya.
14. Teruntuk sahabat akhwat tangguh di kelas Ekonomi Islam, Rani Andika, Nana putriana Lubis, Niswatul Hasanah, Ummiati Ritonga, Maulida Rahmi, Nia Firstya Rizal, Aulia Rahma, Maulidina Rauseky, Seli Safitri, Siti Aisyah, Ulfa Aini Khoirani, Aminah, yang sudah membantu dan meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam penelitian ini, serta memberikan support dan doanya.
15. Teruntuk sahabat KKN 41 Tahun 2018 terkhusus Rika Juliana, Sarah Koto, Siti Okthary dan Fuza lestari.
16. Yang teristimewa kepada semua pihak lainnya yang tidak bisa semuanya di tuliskan dalam kata pengantar teramat singkat ini. Semoga bantuan yang

telah semua berikan kepada penulis dapat dibalas Allah Swt dengan curahan pahala yang tiada pernah bisa mengering sampai kapan pun.

Penulis telah berupaya dengan sekuat tenaga dalam menyelesaikan skripsi ini, namun disadari masih terdapat banyak kekurangan yang kiranya dari sisi isi dan tata bahasanya. Sembari itu penulis menantikan saran dan kritik yang berguna untuk menyempurnakan skripsi ini. Pada akhir kata ini penulis dapat menyampaikan rasa terima kasih dan berharap apa yang ada di dalam skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin.

Medan 19 Mei 2019

Penulis

Rapidah Azmi

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Perumusan Masalah	7
E. Tujuan Dan Kegunaan.....	8
F. Batasan Istilah	9

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Kemiskinan	10
1. Pengertian Kemiskinan	10
2. Kemiskinan Dalam Perspektif Islam	12
3. Jenis Kemiskinan	14
4. Ukuran Kemiskinan	15
5. Penyebab Kemiskinan.....	16
6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan	19
7. Hubungan Pertumbuhan Dengan Kemiskinan.....	21
B. Pengangguran.....	24

1. Pengertian Pengangguran.....	24
2. Klasifikasi Pengangguran.....	24
3. Penyebab Pengangguran	26
4. Kebijakan Pemerintah Mengatasi Pengangguran.....	29
C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	32
1. Pengerian IPM.....	32
2. Komponen IPM.....	35
3. Metode Perhitungan IPM	37
D. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	38
1. Pengertian PDRB	38
E. Hubungan Variabel Independen Terhadap Dependen	41
1. Hubungan Pengangguran Terhadap Kemiskinan.....	41
2. Hubungan IPM Terhadap Kemiskinan.....	42
3. Hubungan PDRB Terhadap Kemiskinan	43
F. Kajian Terdahulu.....	43
G. Kerangka Teoritis.....	49
H. Hipotesis.....	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Jenis dan Sumber Data	52
D. Populasi dan Sampel	52
E. Defenisi Operasional.....	53
F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	54
G. Analisis Data	55
1. Uji Asumsi Klasik.....	55
a. Uji Normalitas.....	55
b. Uji Multikolineritas.....	56
c. Uji Heteroskedastisitas.....	56
d. Uji Autokolerasi	56

2. Uji Hipotesis	56
a. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	57
b. Uji Parsial (t).....	57
c. Uji Simultan (f).....	58

BAB 1V TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data Penelitian.....	60
1. Gambara Umum Kabupaten Labuhanbatu.....	60
2. Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Labuhanbatu	61
3. Perkembangan Pengangguran di Kabupaten Labuhanbatu.....	62
4. Perkembangan IPM di Kabupaten Labuhanbatu.....	63
5. Perkembangan PDRB di Kabupaten Labuhanbatu	64
B. Uji Asumsi Klasik	65
1. Uji Normalitas	65
2. Uji Multikolinearitas	66
3. Uji Autokolerasi.....	67
4. Uji Heteroskedastisitas.....	69
C. Uji Hipotesis.....	69
1. Uji Koefisien Determinasi (R -Square/ R^2).....	70
2. Uji Parsial (t -test).....	70
3. Uji Simultan (Uji Keseluruhan- F).....	72
D. Interpretasi Hasil Penelitian	74
1. Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	74
2. Pengaruh IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	74
3. Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP	82
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011-2017	5
Tabel 2.1	Batas Maksimum dan Minimum	34
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	44
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Labuhanbatu 2011-2017.....	61
Tabel 4.2	Jumlah Pengangguran di Kabupaten Labuhanbatu 2011-2017	62
Tabel 4.3	Jumlah IPM di Kabupaten Labuhanbatu 2011-2017	63
Tabel 4.4	Jumlah PDRB di Kabupaten Labuhanbatu 2011-2017	64
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinearitas	67
Tabel 4.6	Hasil Uji Autokorelasi.....	68
Tabel 4.7	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	69
Tabel 4.8	Hasil Pengujian Koefisien Determinasi	70
Tabel 4.9	Hasil Pengujian Signifikansi Parsial (U_i-t).....	71
Tabel 4.10	Hasil Pengujian Signifikansi Simultan ($U_{ji}-F$)	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kerangka Teoritis	50
Gambar 3.2	Uji Normalitas	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Interpolasi Data Pengangguran, IPM Dan PDRB Dalam Bulanan	83
Lampiran 2	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku	86
Lampiran 3	Uji Regresi Linier Berganda	87
Lampiran 4	Uji Multikolinearitas	88
Lampiran 5	Uji Heteroskedastisitas.....	89
Lampiran 6	Uji Normalitas	90
Lampiran 7	Tabel Persentase Distribusi t.....	91
Lampiran 8	Tabel Durbin Watson.....	93
Lampiran 9	Tabel Persentase Diatribusi F.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah utama yang ingin dituntaskan oleh berbagai negara di seluruh dunia. Negara Indonesia yang merupakan negara berkembang memiliki fokus untuk menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Pengentasan kemiskinan akan menjadi salah satu indikator penting dari keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Menurut peraturan presiden Nomor 116 Tahun 2004 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah membuat program perlindungan sosial, yaitu : Program Simpan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat.

Kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara berkembang, bahkan negara-negara maju pun mengalami kemiskinan walaupun tidak sebesar Negara Berkembang. Persoalannya sama namun dimensinya berbeda. Persoalan kemiskinan di negara maju merupakan bagian terkecil dalam komponen masyarakat mereka tetapi bagi negara berkembang persoalan menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin hampir mencapai setengah dari jumlah penduduk. Bahkan ada negara- negara sangat miskin mempunyai jumlah penduduk miskin melebihi dua pertiga dari penduduknya

Menurut Syahwier fenomena kemiskinan masih menjadi problem pokok terutama didaerah-daerah. Pembangunan ekonomi yang tidak merata mengaburkan realita kemiskinan yang membuat indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman yang meningkat di daerahnya masing-masing. Penyerapan pemerintah kabupaten/kota mengenai kemiskinan akan menunjukkan intergrasi kenegarawan yang kuat. Namun, masalah kemiskinan dengan menghitung kenaikan laju pertumbuhan ekonomi atau mengeluarkan dana bantuan sosial atau dana hibah sebesar-besarnya.¹

Faktor pertama yang mempengaruhi persentase kemiskinan adalah jumlah penduduk yang besar apabila diikuti dengan kualitas yang memadai merupakan modal pembangunan yang handal, namun apabila kualitas rendah justru akan menjadi beban pembangunan. Mereka tidak mempunyai lahan atau alat produksi sendiri biasanya merupakan korban pertama dari langkah-langkah penghematan anggaran pemerintah. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga bagus digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar daerah.²

Kemiskinan disamping pengangguran dan ketimpangan merupakan masalah klasik yang besar dan mendasar bagi sebagian besar negara sedang berkembang termasuk di Indonesia. Berbagai indikator dan parameter untuk mengukur tingkat kemiskinan dan menghitung jumlah penduduk miskin yang telah menjadi permasalahan di kehidupan masyarakat. Sementara itu, kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yakni antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena

¹C.A Syahwier, *Ironi Kemiskinan di Jabar. Pikiran Rakyat* .26

²Dr. Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.171

mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan dan kelompok masyarakat relatif yang lebih kaya.³

Sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan, selain itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Serta masalah-masalah lainnya yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan.⁴

Baik pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kemiskinan meliputi dimensi politik, sosial budaya dan psikologi, ekonomi dan akses terhadap asset. Dimensi tersebut saling terkait dan saling mengunci/ membatasi. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkannya dan tidak memiliki rasa bebas. Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi.

Menurut Yacob bahwa upaya menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori, jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika

³Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi (Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.147

⁴Bapennas, *Direktori Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Periode 1996-2001* (Jakarta), h.3-8

kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan ada miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah maka tingkat kemiskinan juga rendah.

Faktor yang mempengaruhi perluasan kesempatan kerja antara lain: perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kebijaksanaan mengenai perluasan kesempatan kerja itu sendiri. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting disamping sumber alam, modal dan teknologi. Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, sebagai pelaku pembangunan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat dengan lingkungan, bahkan masalah ketenagakerjaan dapat menimbulkan masalah baru baik di bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatan yang selanjutnya memicu munculnya kemiskinan.⁵

Menurut Mudrajad bahwa IPM bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar negara maupun antar daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.⁶

Dengan masyarakat yang sehat dan berpendidikan yang baik, peningkatan produktivitas masyarakat akan meningkatkan pula pengeluaran untuk konsumsinya, ketika pengeluaran untuk konsumsi meningkat, maka tingkat kemiskinan akan menurun. Disisi lain, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Rendahnya produktivitas berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.⁷

⁵Yarlina Yaqoub, *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal EKSOS Vol. 8, Nomor 3, Oktober 2012, h.176-185

⁶Mudjarat Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006), h.67

⁷Prima Sukmaraga, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011, h.8

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memahami dinamika perekonomian suatu wilayah dengan melihat percepatan perekonomiannya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan adanya kenaikan permintaan akan barang dan jasa, artinya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa akan meningkat, sehingga secara tidak langsung dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi kemiskinan yang selalu diidentikkan dengan tidak mampunya masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Dapat dikatakan bahwa ketika perekonomian suatu daerah mengalami peningkatan maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Miskin, Pengangguran, IPM , PDRB Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Pengangguran (Ribu Jiwa)	IPM (%)	PDRB (Juta Rupiah)
2011	42610	11835	67.88	16378786.3
2012	41310	12897	68.64	18004423.8
2013	38140	17025	69.45	20117620.67
2014	37350	14682	70.06	22176001.94
2015	41630	20999	70.23	24083108.12
2016	41940	23512	70.50	26505235.84
2017	41980	24623	70.64	29030570.39

Berdasarkan tabel 1.1 dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan di tahun 2011 sebanyak 42610 jiwa, sementara jumlah pengangguran mengalami penurunan pada tahun 2011 sebanyak 11835 jiwa, bahwa teori mengatakan jika tingkat pengangguran naik maka akan memicu jumlah kemiskinan bertambah namun, jumlah data tidak sesuai dalam teori yang

di kemukakan. Memasuki tahun 2012 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 41310 jiwa, tetapi jumlah pengangguran semakin meningkat sebanyak 12897 jiwa, tahun 2013 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan kembali sebanyak 38140 jiwa namun jumlah pengangguran meningkat sebanyak 17025 jiwa, di tahun 2014 penduduk miskin menurun sebanyak 37350 jiwa dan pengangguran juga mengalami penurunan sebanyak 14682 jiwa. di tahun 2015-2017 penduduk miskin meningkat kembali dan pengangguran juga semakin meningkat setiap tahunnya. Dapat di lihat bahwa data pengangguran cenderung bersifat fluktuatif.

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa IPM setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebanyak 67.88 % sampai 2014 sebanyak 70.06% namun di tingkat kemiskinan tahun 2011 juga mengalami peningkatan sebanyak 42610 jiwa sehingga di tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 37350 jiwa, hal ini diperkuat teori rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Rendahnya produktivitas berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Namun kenyataannya setiap tahunnya tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan.

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa PDRB setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi kenyataannya juga tingkat kemiskinan tidak sesuai dalam teori yang di kemukakan. Dalam data 2011 PDRB meningkat sebanyak 16378786.3 namun tingkat kemiskinan semakin meningkat sebanyak 42610 jiwa . tetapi di tahun 2013 PDRB meningkat sebesar 20117620.67 dan tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebanyak 38140 jiwa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka cukup menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang akan mencoba **“PENGARUH JUMLAH PENGANGGURAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PDRB TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN LABUHANBATU ”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Masih banyaknya masyarakat yang tidak bekerja dan sulit memenuhi kebutuhan hidup.
2. Penanggulangan kemiskinan masih jauh dari induk permasalahan kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran, indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu sehingga peneliti memfokuskan pada pengaruhnya. Alasan peneliti ini dibatasi agar lebih terarah dan dapat dibahas secara tuntas dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Dan perlu adanya pembatasan masalah faktor-faktor yang mempengaruhi setiap variabel tersebut.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu?
2. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu?
3. Apakah produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu?
4. Apakah pengangguran, indeks pembangunan manusia dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.
- c. Untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.
- d. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran, indeks pembangunan manusia dan produk domestik regional bruto (PDRB) secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan landasan serta wawasan bagi penulis sejauh mana keterkaitan antara pengangguran, indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengetahui bagaimana pengaruh pengangguran, indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.
- c. Sebagai tambahan dan pelengkap bagi peneliti sebelumnya.

F. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman penulis dalam peneliti ini, maka penulis membuat batasan istilah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun istilah tersebut adalah antara lain:

- a. Menurut Thomas pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis.
- b. Indeks pembangunan manusia (IPM), atau dikenal dengan sebutan human development indeks (HDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia.
- c. Produk Domestik regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Atau apabila ditinjau dari segi pendapatan merupakan jumlah dari pendapatan yang diterima oleh faktor- faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam lingkungan serba miskin atau kekurangan modal, baik dalam pengertian uang, pengetahuan maupun, kebutuhan sosial, politik, hukum maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, kesempatan berusaha dan bekerja. Kemiskinan berarti suatu kondisi dimana orang atau sekelompok orang tidak mempunyai kemampuan, kebebasan, asset dan aksesibilitas untuk kebutuhan mereka diwaktu yang akan datang, serta sangat rentan terhadap resiko dan tekanan yang disebabkan oleh penyakit dan peningkatan secara tiba-tiba atas harga-harga bahan makanan dan uang sekolah.⁸

Badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan sumber daya alam serta lingkungan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.⁹

Kemiskinan juga dapat dikaitkan dengan suatu jenis konsumsi tertentu, sebagai contoh suatu masyarakat dapat saja dikatakan miskin karena tidak memiliki tempat tinggal, kekurangan pangan, atau memiliki kondisi kesehatan yang buruk. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut sering kali dapat diukur secara

⁸Suparlan Parsudi, *Kemiskinan Perkotaan dan Alternatif Penanganannya Ditujukan Dalam Seminar Forum Perkotaan*, (Jakarta:Prasana Wilayah,2000), h.57

⁹*Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2004*

langsung, misalnya dengan mengukur tingkat kekurangan gizi atau kemampuan membaca dan menulis.¹⁰

Distribusi pengeluaran sosial yang tidak seimbang merupakan faktor utama bertambahnya ketimpangan dengan demikian tersebar keuntungan dinikmati oleh kelas menengah dan orang kaya. Hampir sepertiga dari seperlima penduduk miskin tidak mengikuti sekolah dasar. Hanya sekolah dasar yang secara relatif harus disesuaikan oleh rakyat miskin, bukan karena pemerintah berhasil dalam menargetkan sumber dayanya, tetapi karena masyarakat yang lebih kaya yang banyak menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah swasta. Pengeluaran publik untuk pendidikan menengah keatas sangat jauh dari sasaran pemerintah, yaitu terhadap rakyat miskin.¹¹

Teori adam smith menyatakan bahwa tidak ada masyarakat yang makmur dan bahagia, jika sebagian besar penduduknya berada dalam kemiskinan dan penderitaan. Adam Smith dalam bukunya *the wealth of Nations* menyatakan bahwa kebutuhan dasar bukan hanya hal-hal yang bersifat alamiah saja, tetapi juga hal-hal yang ditetapkan oleh norma umum tentang kelayakan.

Selain teori Adam Smith, terdapat pula teori kemiskinan dn teori kelas, teori ini dikategorikan menjadi dua, yaitu teori yang memfokuskan pada teori perilaku individu dan teori yang mengarah pada struktur sosial. Teori perilaku individu menyakini bahwa sikap individu yang tidak produktif, mengakibatkan lahirnya kemiskinan. Teori struktur sosial melihat bahwa kondisi miskinlah yang mengakibatkan perilaku tertentu pada setiap individu, yaitu mengakibatkan munculnya sikap individu yang tidak produktif merupakan akibat dari adaptasi dengan keadaan kemiskinan. Pada tingkat ekstrem, kedua model ini bersifat sangat normatif terlihat dari tulisan-tulisanya tentang perilaku individu sama-sama melakukan tuduhan moral, bahwa orang yang tidak produktif dikarenakan mereka lemah dibidang kualitas, latihan atau normalitas, dan mereka harus bangkit sendiri, dan berbuat lebih baik.

¹⁰Jonathan Haughton, *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan Handbook On Poverty And Inequality*, (Jakarta:Salemba Empat, 2012), h.1

¹¹Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik daerah Kabupaten Labuhan batu*, 2017

b. Kemiskinan Dalam Perspektif Islam

Al-Qur'an berbicara tentang kemiskinan jauh berabad-abad silam sebagai bagian dari misi revolusi masyarakat Arab yang terjebak dalam jurang ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Kemiskinan dianggap sebagai petaka, sehingga bagi mereka yang berada dalam garis kemiskinan hanya dijadikan sebagai masyarakat yang marginal dan pantas dijadikan sebagai 'budak' belaka. Bahkan di antara mereka ada yang rela mengubur buah hatinya karena takut menjadi miskin. Dalam menjelaskan konsep kemiskinan ini, al-Qur'an biasa menggunakan term *faqîr* dan *miskîn*.¹²

Sedangkan secara terminologis, banyak ulama yang mengemukakan makna terminologis tentang *faqîr*, salah satunya pendapat Abi Abdullah al-Qurtubi ketika menginterpretasikan QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan untuk memerdekakan hatinya (muallaf) untuk (memerdekakan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, maha bijaksana". (QS. At-Taubah, 9: 60).¹³

Selain definisi terminologis tersebut, para pakar agama juga berbeda pendapat dalam menetapkan tolok ukur kemiskinan dan kefakiran. Secara langsung, tidak ada informasi al-Qur'an maupun hadis dalam menetapkan angka tertentu lagi pasti sebagai ukuran kemiskinan. Al-Qur'an hanya menegaskan perintah untuk menyantuni orang fakir dan miskin, larangan menganiaya mereka,

¹² Saiful Ilmi, *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*, Vol.15 No.1 April, 2017

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat At-Taubah:60* (Surakarta:Media Insani Publishing, 2007), h.196

larangan memarginalkan dan mendiskreditkan mereka, larangan menumpuk harta, dan lain sebagainya.¹⁴

Perlu disadari, bahwa harta merupakan *pit fall* seluruh lapisan masyarakat, terkecuali orang-orang tertentu yang dijamin kema'sumannya. Kemiskinan tidak lahir begitu saja, melainkan ada latar belakang dan penyebabnya. Walaupun para ahli ilmu-ilmu sosial sependapat bahwa sebab utama yang melahirkan kemiskinan adalah sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, tetapi kemiskinan itu sendiri bukanlah suatu gejala terwujud semata-mata hanya karena sistem ekonomi.¹⁵

Dengan kata lain, sejatinya harta yang kita miliki tidak sepenuhnya milik kita. Di dalamnya ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Perintah ini ditemukan pada *Q.S al-Isra'/17:26*:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦)

Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta”.

Ketika menjelaskan ayat di atas, M.Quraish Shihab menyatakan bahwa, Allah menjadikan hal-hal di atas indah bagi manusia secara naluriah dan fitriah karena Allah menugaskan makhluk sempurna ini membangun dan memakmurkan bumi. Untuk melaksanakan tugas kekhilafahan itu, manusia harus memiliki naluri mempertahankan hidup di tengah aneka makhluk, baik dari jenisnya maupun dari jenis makhluk hidup lainnya yang memiliki naluri yang sama.¹⁶

¹⁴M. Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi al-Qur'an; Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), h.159

¹⁵Sa'ad Ibrahim, *Kemiskinan dalam Perspektif al-Qur'an* (Malang:UIN Malang Press, 2007), h.52

¹⁶Dr.H.Azhar Akmal Tarigan,M.Ag,*Tafsir Ayat-ayat Ekonomi*(FEBI UINSU Press,2016), h.60

c. Jenis Kemiskinan

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

a. Kemiskinan absolut

Kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.

b. Kemiskinan relatif

Kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

c. Kemiskinan kultural

Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mauberusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

d. Kemiskinan struktural

Situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan subur nya kemiskinan.¹⁷

¹⁷Criswardani Suryawati, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, Vol 8 No.3, Edisi 11 November 2005.

d. Ukuran Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah angka absolut. Apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan, sehingga jumlahnya tidak dapat memenuhi hidup minimumnya ini yang disebut kemiskinan absolut. Konsep dasar ukuran kemiskinan berhubungan dengan pengeluaran kebutuhan dasar minimum rata-rata seorang individu hidup normal. Kebutuhan dasar termasuk pilihan makanan dasar dan golongan bukan makanan. Jika seorang individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar menunjukkan bahwa individu tersebut dapat dikategorikan miskin. Jumlah pengeluaran dapat digunakan batas antara miskin dan tidak miskin. Batas ini disebut juga dengan garis kemiskinan.

Menurut konsep pengeluaran yang dikembangkan Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan dinyatakan sebagai besarnya rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setara dengan 2100 kalori per kapita perhari ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lain seperti sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, dan bahan bakar. Besarnya pengeluaran per kapita yang ditentukan sebagai garis kemiskinan dibedakan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Disamping perkiraan garis kemiskinan nasional, telah dilakukan pula beberapa perkiraan mengenai garis kemiskinan internasional didalam mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia. Garis kemiskinan untuk daerah pedesaan dan perkotaan masing-masing sama dengan 20kg dan 30 kg beras dalam nilai rupiah pendapatan perkapita rata rata individu.¹⁸

Tiga langkah yang perlu diambil dalam mengukur kemiskinan menurut Ravallion:

- a. Menentukan indikator kesejahteraan.
- b. Menetapkan standar minimal yang dapat diterima indikator tersebut untuk memisahkan antara masyarakat miskin dan masyarakat tidak miskin (garis kemiskinan) dan

¹⁸Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Daerah Kabupaten Labuhan Batu*, 2017

- c. Membuat rangkuman statistik untuk menggabungkan informasi dari distribusi indikator kesejahteraan yang berkaitan dengan garis kemiskinan.¹⁹

e. Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan sendiri sangat bervariasi, antara lain disebabkan oleh karena faktor lingkungan, sosio kultural, ekonomi, politik, kebijakan publik dan sebagainya. Sementara itu, pengangguran dapat disebabkan karena ketidakmampuan mereka atau tidak adanya peluang kerja dan usaha.

Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor, jarang ditemukan kemiskinan yang hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Menurut Suharto secara konsep, kemiskinan bisa diakibatkan oleh empat faktor yaitu:

- a. Faktor individual

Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin, orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan atau kemampuan si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.

- b. Faktor sosial

Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin, misalnya diskriminasi berdasarkan usia, jender, etnis, yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.

- c. Faktor kultural

Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan, faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya kemiskinan” yang menggabungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. Sikap-sikap negatif seperti malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha dan kurang menghormati etos kerja.

¹⁹Jonathan Haughton, *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan Handbook On Poverty And Inequality*, (Jakarta:Salemba Empat, 2012), h.2

d. Faktor struktural

Menunjuk pada strktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak accessible sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh, sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan,dan pekerja sektor informal terjerat oleh dan sulit keluar dari kemiskinan. Sebaliknya stimulus ekonomi, pajak dan iklim investasi lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus menumpuk kekayaan.²⁰

Penyebab kemiskinan diatas bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah suatu lingkaran suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik.

Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, baik invetasi manusia maupun investasi kapital. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse yang mengatakan “ *a poor country is a poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena diamiskin).²¹

Menurut Nurkse ada dua lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari segi penawaran (*supply*) dimana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah.Kemampuan untuk menabung rendah,

²⁰Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia dalam edisi Menggagas Model Jaminan Sosial Universal di Bidang Kesehatan*, (Bandung:Alfabeta, 2004), h.17-18

²¹Yogi Citra Pratama, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia*,Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol.4 No.2 Agustus, 2014

menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah, tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal, dan dengan demikian tingkat produktivitasnya juga rendah dan seterusnya. Dari segi permintaan (demand), di negara-negara yang miskin perangsang untuk menanamkan modal adalah sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang adanya terbatas, hal ini disebabkan oleh karena pendapatan masyarakat sangat rendah. Pendapatan masyarakat sangat rendah karena tingkat produktivitas yang rendah, sebagai wujud dari tingkatan pembentukan modal yang terbatas dimasa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan kekurangan perangsang untuk menanamkan modal dan seterusnya.

Pada masa Indonesia mencapai kemerdekaan, pemerintah pada masa itu sebenarnya telah memberikan perhatian pada kemiskinan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan adanya peraturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebagai dasar hukum utama dalam bidang peraturanperundang-undangan di Indonesia) Pasal 34 dan Pasal 27 ayat (2). Pasal 34 berisi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Dan Pasal 27 ayat (2) berisi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Atas dasar pasal-pasal tersebut, kemudian pemerintah melakukan pembuatan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan dalam berbagai bidang.²²

Adapun usaha-usaha pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ini adalah:

- a. Bantuan sosial kepada warganegara baik secara perseorangan maupun dalam kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan jadi korban akibat terjadinya bencana-bencana, baik sosial maupun alamiah, atau peristiwa-peristiwa lain.
- b. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu sistim jaminan sosial.

²²Yeni Salma Barlinti, *Jurnal Kebijakan-Kebijakan Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, Lex Jurnalica, Vol.4 No.3 Agustus, 2007

- c. Bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial termasuk di dalamnya penyaluran ke dalam masyarakat, kepada warga negara baik perorangan maupun dalam kelompok, yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, yang terlantar atau yang tersesat. Pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotong-royongan.

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan menurut penelitian Zam zam yaitu:

- a. Pendidikan

Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industri, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai *skill* atau paling tidak dapat membaca dan menulis.

- b. Lapangan Kerja

Lapangan kerja adalah suatu tempat atau kantor yang masih kekurangan tenaga kerja. Usia angkatan kerja di negara berkembang >15 tahun tetapi usia tersebut sebenarnya masih tergolong anak-anak. Idealnya seseorang dapat bekerja mencari penghasilan adalah usia di atas 17 tahun. Angkatan kerja di Indonesia kualitasnya masih rendah karena sebagian besar lulusan tidak tamat *SD & SMP*.

- c. Pendapatan

Pada umumnya tolak ukur yang paling banyak dipakai untuk mengukur laju pembangunan ekonomi suatu negara dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, perlu diketahui tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dan besarnya pendapatan per kapita. Besarnya pendapatan nasional akan menentukan besarnya pendapatan per kapita.

Sedangkan besarnya pendapatan per kapita biasanya sering dianggap sebagai gambaran tingkat kesejahteraan.

d. Pengeluaran

Menurut Suryana dalam analisis makro ekonomi perhitungan pendapatan nasional didasarkan sifat pengeluaran yang dilakukan oleh setiap rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri berupa ekspor dan import. Alasan pertama, konsumsi rumah kebanyakan negara pengeluaran konsumsi sekitar 60-75 persen dari pendapatan nasional. Alasannya yang kedua, konsumsi rumah tangga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya. Komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Semakin kecil pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Pengeluaran konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat.²³

e. Keterbatasan Sumber Daya Alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber daya alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumber daya alamnya miskin.²⁴

g. Hubungan Pertumbuhan dan Kemiskinan

Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan pendapatan perkapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin

²³Suryana, *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h.10

²⁴Zam-zam, *faktor- faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

berangsur-angsur berkurang. Tentu banyak faktor-faktor lain selain pertumbuhan pendapatan yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/negara, seperti derajat pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.²⁵

Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat. Beberapa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain.

- a. Produk Domestik Bruto PDB adalah merupakan jumlah dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya dan bukan merupakan alat ukuran pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya.
- b. PDB per kapita atau pendapatan perkapita PDB per kapita merupakan produk domestik bruto per kapita atau produk domestik regional bruto per kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara daripada nilai PDB atau PDRB saja.
- c. Pendapatan per jam kerja sesungguhnya adalah alat pengukur yang paling baik untuk mengukur maju tidaknya suatu perekonomian.
- d. Harapan hidup waktu lahir , juga dapat dipakai untuk melihat kemajuan dan kesejahteraan suatu perekonomian. Memang kesejahteraan dapat benar-benar dirasakan bila seseorang dapat memenuhi semua kebutuhannya seperti kebutuhan akan barang dan jasa, termasuk kesehatan, pendidikan dan sebagainya.²⁶

Menurut Maltus kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan

²⁵Dr. Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.89

²⁶Yani Abdillah, Isnaini Harahap, dan Marliyah, "*Analisis Tingkat Kesenjangan Pada Masyarakat Tebing Tinggi*", (Medan:FEBI UINSU Press, 2015), h.42-43.

persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit diatas tingkat subsiten.

Menurut Todaro menyatakan bahwa dalam perhitungan indek kemiskinan dengan pengukuran indeks Foster Greer Thorbecke yang sering disebut juga sebagai kelas $P\alpha$ dari ukuran kemiskinan yaitu dirumuskan sebagai berikut:

Dimana:

$$P\alpha_n^1$$

$\alpha = 0, 1, 2$

$z =$ Garis kemiskinan

$i y =$ Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y < z$.

$q =$ Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

$n =$ Jumlah penduduk.

Jika:

- $\alpha = 0$, maka diperoleh *Head Count Index* ($0P$), yaitu persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.
- $\alpha = 1$, maka diperoleh *Poverty Gap Index* ($1P$), yaitu indeks kedalaman kemiskinan, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indek, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- $\alpha = 2$, maka diperoleh *Poverty Severity* ($2P$), yaitu indeks keparahan kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Menurut Maier dikutip dari Mudrajat Kuncoro, di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia.

Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan.

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumberdaya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit.
2. Banyak negara dimana penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya.
3. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarannya kota-kota di NSB membawa masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan warga kota.

B. Pengangguran

1. Pengertian Pengangguran

Menurut Thomas pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim, bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja.

Para ekonom mempelajari pengangguran untuk mengidentifikasi penyebabnya dan untuk memperbaiki kebijakan publik yang mempengaruhi pengangguran. Sebagian dari kebijakan tersebut, seperti program pelatihan kerja, membantu

orang dalam mendapatkan pekerjaan. Kebijakan lain, seperti asuransi pengangguran, membantu mengurangi kesulitan yang dialami para pengangguran. Tetapi kebijakan lainnya tetap saja mempengaruhi munculnya pengangguran secara tidak sengaja. Undang-undang yang menetapkan upah minimum yang tinggi misalnya cenderung akan meningkatkan pengangguran di kalangan angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang berpengalaman.²⁷

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang dialami banyak negara. Begitu seriusnya masalah ini sehingga dalam setiap rencana pembangunan ekonomi masyarakat selalu dikatakan dengan tujuan untuk menurunkan angka pengangguran. Namun, kebijakan pemecahannya sudah barang tentu harus dialamatkan kepada apa yang menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, setiap analisis masalah-masalah ini selalu berminat untuk mengetahui profil permasalahannya.²⁸

Menurut Sukirno bahwa pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Sementara menurut Kaufman dan Hotchkiss, pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan.²⁹

Menurut Yacob bahwa upaya menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori, jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan ada miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah maka tingkat kemiskinan juga rendah.

Faktor yang mempengaruhi perluasan kesempatan kerja antara lain: perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan

²⁷N.Gregory Mankiw, *Makro Ekonomi Edisi Keenam*, (Jakarta:Erlangga, 2006), h.154

²⁸Dra.Arvida BR,M.S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), h.135

²⁹Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014), h.110

kebijaksanaan mengenai perluasan kesempatan kerjaitu sendiri. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting disamping sumber alam, modal dan teknologi. Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, sebagai pelaku pembangunan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat dengan lingkungan, bahkan masalah ketenagakerjaan dapat menimbulkan masalah baru baik di bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatanyang selanjutnya memicu munculnya kemiskinan.³⁰

2. Klasifikasi Pengangguran

Menurut Sukirno pengangguran dapat dipilah menjadi dua kelompok besar, yaitu: berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan ciri-cirinya. Berdasarkan penyebabnya, pengangguran terdiri dari: pengangguran normal, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi. Berdasarkan cirinya pengangguran terdiri dari: pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran bermusim, dan setengah menganggur.³¹

a. Pengangguran Normal

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong

³⁰Yarlina Yaqoub, *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal EKSOS Vol. 8, Nomor 3, Oktober 2012, h.176-185

³¹*Ibid*, h.110-113

para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai penganggur normal.

b. Pengangguran Siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang secara stabil, adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya barang yang tersedia. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada pengusaha-pengusaha mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.

c. Pengangguran Struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut, yaitu terwujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan keatas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktural kegiatan ekonomi.

d. Pengangguran Teknologi

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput, misalnya telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

e. Pengangguran terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

f. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu

kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi, contohnya adalah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

g. Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pada para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

h. Setengah Menganggur

Kondisi migrasi dari desa ke kota di negara-negara biasanya sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu, ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari normal. Mereka mungkin bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur (*underemployed*). Jenis penganggurannya dinamakan *underemployment*.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang adadi negara yang sedang berkembang menjadi semakin serius. Tingkat pengangguran terbuka sekarang ini yang ada di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia rata-rata sekitar 10 persen dari seluruh angkatan kerja

diperkotaan. Masalah ini dipandang lebih serius lagi bagi mereka yang berusia antara 15-24 tahun yang kebanyakan mempunyai pendidikan yang lumayan.³²

Pada negara yang sedang berkembang bukan saja menghadapi kemerosotan dalam ketimpangan relatif tetapi juga masalah kenaikan dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran. Besarnya dimensi kemiskinan tercermin dari jumlah penduduk yang tingkat pendapatan atau konsumsinya berada di bawah tingkat minimum yang telah ditetapkan. Masyarakat miskin pada umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, melemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga.³³

3. Penyebab Pengangguran

Menurut Kaufman dan Hotchkis, mengidentifikasi penyebab pengangguran, yaitu: 1). Proses mencari kerja 2). Kekakuan upah 3). Efisiensi upah, proses mencari kerja, pada proses ini menyediakan penjelasan teoritis yang penting bagi tingkat pengangguran. Munculnya angkatan kerja baru akan menimbulkan persaingan yang ketat pada proses mencari kerja. Dalam proses ini terdapat hambatan dalam mencari kerja yaitu disebabkan karena adanya para pekerja yang ingin pindah ke pekerjaan lain, tidak sepenuhnya informasi yang diterima pencari kerja mengenai lapangan kerja yang tersedia, serta informasi yang tidak sempurna pada besarnya tingkat upah yang layak mereka terima, dan sebagainya.

Kekakuan upah, besarnya pengangguran yang terjadi dipengaruhi juga oleh tingkat upah yang tidak fleksibel dalam pasar tenaga kerja. Penurunan pada proses produksi dalam perekonomian akan mengakibatkan pergeseran atau

³²World Bank, *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (ikhtisar)*. (Jakarta: The World Bank, 2005), h.57

³³Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.45

penurunan pada permintaan tenaga kerja. Akibatnya, akan terjadi penurunan besarnya upah yang ditetapkan. Dengan adanya kekakuan upah, dalam jangka pendek, tingkat upah akan mengalami kenaikan pada tingkat upah semula. Hal ini akan menimbulkan kelebihan penawaran (*excess supply*) pada tenaga kerja sebagai inflasi dari adanya tingkat pengangguran akibat kekakuan upah yang terjadi.

Efisiensi upah, besarnya pengangguran juga dipengaruhi oleh efisiensi pada teori pengupahan. Efisiensi yang terjadi pada fungsi tingkat upah tersebut terjadi karena semakin tinggi perusahaan membayar upah maka akan semakin keras usaha para pekerja untuk bekerja (walaupun akan muncul juga kondisi dimana terjadi *diminishing rate*). Hal ini justru akan memberikan konsekuensi yang buruk jika perusahaan memilih membayar lebih pada tenaga kerja yang memiliki efisiensi lebih tinggi maka akan terjadi pengangguran terpaksa akibat dari persaingan dalam bekerja.³⁴

4. Kebijakan Pemerintah Mengatasi Pengangguran

Dalam mengatasi pengangguran didasarkan pertimbangan-pertimbangan bersifat ekonomi dalam hal ini ada tiga pertimbangan utama yaitu:

a. Menyediakan lowongan pekerjaan

Dalam jangka panjang usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu bertambah dalam menyebabkan pertambahan tenaga kerja yang terus-menerus. Agar dapat menghindari masalah pengangguran yang semakin serius, tambahan lowongan pekerjaan yang cukup perlu disediakan dari tahun ke tahun.

b. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat

Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Dengan demikian kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang bukan saja menambah pendapatan nasional tetapi juga meningkatkan pendapatan perkapita, melalui perubahan ini kemakmuran masyarakat akan bertambah.

³⁴*Ibid*, h.114-115

c. Memperbaiki tingkat pengangguran,

Yang terlalu besar cenderung untuk menurunkan upah golongan berpendapatan rendah dapat disimpulkan kesempatan kerja dapat memperbaiki pembagian pendapatan. Pengangguran yang juga digunakan sebagai alat untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat.

Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila suatu negara tingkat pengangguran banyak maka akan menimbulkan efek pada kesejahteraan masyarakat dan proyek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang sehingga pemerintah harus lebih berupaya dalam mengurangi pengangguran sehingga masyarakat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Human Development Report (HDR) menyatakan bahwa, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Menurut Mudrajad bahwa IPM bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar negara maupun antar daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.³⁵

³⁵Mudjarat Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006), h.67

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.³⁶

Rumus umum yang di pakai dalam IPM adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{IPM=1/3(X1+X2+X3)}$$

Dimana:

- X1 = Indeks Harapan Hidup
 X2 = Indeks Pendidikan
 X3 = Indeks Standar Hidup

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu di hitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{IPM = \sum_{i=1}^3 I_i} \quad : \quad \mathbf{I_i = \frac{X_i - Min X_i}{Max X_i - Min X_i}}$$

Dimana:

- I_i = Indeks Komponen IPM ke i dimana i = 1,2,3
 X_i = Nilai Indikator Komponen IPM ke 1

³⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), *Konsep Daerah Kabupaten Labuhanbatu*, 2017

Max Xi = Nilai Maksimum Xi

Tabel 2.1 : Batas Maksimum dan Minimum

No	Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	85	25	Standar UNDP
2	Angka Melek Huruf (Persen)	100	0	Standar UNDP
3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	15	0	
4	Daya Beli (Rupiah PPP)	732.720	300.000(1996)	Pengeluaran per Kapita Rill Disesuaikan

Sumber: Badan Pusat Statistik Labuhan Batu

Indeks pembangunan manusia (IPM), atau dikenal dengan sebutan *human development indeks* (HDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM adalah suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga indikator, yakni (a) kesehatan, (b) pendidikan yang dicapai dan (c) standar kehidupan.

Jadi, jelas bahwa tiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk meningkatkan IPM nya. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, selain juga di pengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya di tentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Jadi, IPM disuatu provinsi akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di provinsi tersebut. Dalam perkataan lain,

terdapat suatu korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi.³⁷

2. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya.

United Nations Development Programs (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing powerparity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.³⁸

³⁷Dr. Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.167

³⁸Siske Yanti Maratade dkk, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara (Studi pada tahun 2002-2016)*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.16 No.01 Tahun 2016

Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam indeks pembangunan manusia sebagai berikut:

- a. Angka harapan hidup
Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.
- b. Angka melek huruf
Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.
- c. Rata-rata lama sekolah
Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.
- d. Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan
UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan produk domestik bruto (PDB) riil yang di sesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang di sesuaikan dengan formula Atkinson.³⁹

3. Metode Perhitungan IPM

Metode agregasi diubah dari rata-rata penduduk menjadi rata-rata geometrik. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup lama sekolah PNB menggambarkan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capain pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah dan PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian dimensi

³⁹Badan Pusat Statistik (BPS), *Konsep Daerah Kabupaten Labuhanbatu*, 2017

lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Setiap komponen IPM menghitung indeks masing-masing di standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM.

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

1. Dimensi Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\text{min}}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\text{min}}}$$

2. Dimensi Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\text{min}}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\text{min}}}$$

$$I_{\text{HLS}} = \frac{RSL - RSL_{\text{min}}}{RSL_{\text{maks}} - RSL_{\text{min}}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{IHLS + IRSI}{2}$$

3. Dimensi Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

Manfaat indeks pembangunan manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM salah satunya dimana IPM merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan sebagian data dalam ukuran kinerja pemerintah dan salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).⁴⁰

D. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

⁴⁰ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Daerah Kabupaten Labuhanbatu*, 2017

Pendapatan nasional adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.⁴¹

Menurut Sadono, laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Pendapatan regional adalah tingkat (besarnya) pendapatan masyarakat pada wilayah analisis. Menganalisis suatu region atau membicarakan pembangunan regional tidak mungkin terlepas dari membahas tingkat pendapatan wilayah maupun pendapatn rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Pembangunan wilayah haruslah bersangkutan paut dengan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut, yaitu yang dimaksud adalah pendapatan rata-rata (*income per capita*) masyarakat.

⁴¹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Konsep Daerah Kabupaten Labuhanbatu*, 2017

Produk Domestik regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Atau apabila ditinjau dari segi pendapatan merupakan jumlah dari pendapatan yang diterima oleh faktor- faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu.

Hasil perhitungan PDRB disajikan atas PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun dan memasukkan nilai inflasi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya dan tidak memasukkan nilai inflasi.

Ada beberapa cara lain yang lazim digunakan dalam perhitungan pendapatan suatu daerah yakni:

- a. Pendekatan Produksi (*Production Approach*) adalah jumlah Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. NTB adalah Nilai Produksi Bruto (NPB/Output) dari barang dan jasa tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang digunakan dalam proses produksi.
- b. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) adalah jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/region dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut maka NTB adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.
- c. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*) adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto dan ekspor neto (ekspor neto

merupakan ekspor dikurangi impor), di dalam suatu wilayah/region dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.

Pendapatan regional per kapita atau PDRB per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan pendapatan perkapita, PDRB perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut.⁴²

Sebagai indikator ekonomi yang mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu negara, pendapatan per kapita di hitung secara berkala (*Periodik*) biasanya satu tahun. Manfaat dari perhitungan pendapatan perkapita antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun.
- b. Sebagai data perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Dari pendapatan per kapita masing-masing negara dapat di lihat tingkat standar hidup.
- c. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya. Dengan mengambil dasar pendapatan perkapita dari tahun ke tahun, dapat di simpulkan apakah pendapatan per kapita suatu negara rendah (bawah), sedang atau tinggi.
- d. Sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Pendapatan per kapita dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah di bidang ekonomi.

E. Hubungan Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

1. Hubungan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan

⁴²Dr. Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.143

Menurut Sukirno bahwa pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Sementara menurut Kaufman dan Hotchkiss, pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan.⁴³

Menurut Yacoub bahwa upaya menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori, jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan ada miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah maka tingkat kemiskinan juga rendah.

Faktor yang mempengaruhi perluasan kesempatan kerja antara lain: perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kebijaksanaan mengenai perluasan kesempatan kerja itu sendiri. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting disamping sumber alam, modal dan teknologi. Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, sebagai pelaku pembangunan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat dengan lingkungan, bahkan masalah ketenagakerjaan dapat menimbulkan masalah baru baik di bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatannya selanjutnya memicu munculnya kemiskinan.⁴⁴

2. Hubungan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan

Kualitas sumber daya manusia dapat menjadi faktor penyebab utama terjadinya kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks

⁴³Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.110

⁴⁴Yarlina Yaqoub, *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal EKSOS Vol. 8, Nomor 3, Oktober 2012, h.176-185

Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Mudrajat bahwa IPM bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar negara maupun antar daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.⁴⁵

Dengan masyarakat yang sehat dan berpendidikan yang baik, peningkatan produktivitas masyarakat akan meningkatkan pula pengeluaran untuk konsumsinya, ketika pengeluaran untuk konsumsi meningkat, maka tingkat kemiskinan akan menurun. Disisi lain, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Rendahnya produktivitas berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.⁴⁶

3. Hubungan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memahami dinamika perekonomian suatu wilayah dengan melihat percepatan perekonomiannya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan adanya kenaikan permintaan akan barang dan jasa, artinya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa akan meningkat, sehingga secara tidak langsung dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi kemiskinan yang selalu diidentikkan dengan tidak mampunya masyarakat dalam

⁴⁵Mudjarat Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006), h.67

⁴⁶Prima Sukmaraga, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Skripsi, Fakultas Ekonomi Univesitas Diponegoro, 2011, h.8

pemenuhan kebutuhan. Dapat dikatakan bahwa ketika perekonomian suatu daerah mengalami peningkatan maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang telah ada. Untuk penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 : Penelitian Terdahulu

Nama Pengarang	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Rusdarti & Lesta Karolina Sebayang 2013	Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemiskinan 2. Belanja publik 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 	<p>Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Faktanya bahwa jumlah orang miskin di daerah lebih besar dari pada kota. Secara statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan variabel lainnya seperti pengeluaran publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran pengaruhnya tidak signifikan.</p>

Noor Zuhdiyaty & David Kaluge 2017	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia selama lima tahun terakhir (Studi kasus pada 33 Provinsi).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemiskinan 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independent pertumbuhan ekonomi, TPT, dan IPM berpengaruh secara simultan/bersama-sama terhadap variabel dependent kemiskinan dapat dilihat dari nilai f statistik < 0.05. Pada nilai R^2 sebesar 0.96840 menjelaskan bahwa variabel independent dan menjelaskan 96% dari variabel dependent dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.</p> <p>Pertumbuhan ekonomi, TPT, dan IPM memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan.</p> <p>Diantara ketiga variabel tersebut hanya variabel IPM yang berpengaruh terhadap kemiskinan.</p> <p>Sementara pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap</p>
--	---	---	---

			<p>kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang kurang berkualitas sehingga tidak mempengaruhi kemiskinan. Begitu juga dengan pengangguran bahwa tingkat TPT juga tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, hal ini menandakan bahwa mereka yang menganggur belum tentu memiliki pendapatan yang rendah.</p>
<p>Santi Nurmainah 2013</p>	<p>Analisis pengaruh belanja modal, pemerintah daerah, tenaga kerja terserap dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (Studi kasus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Modal 2. Pemerintah Daerah 3. Tenaga Kerja Terserap 4. Indeks Pembangunan Manusia 5. Pertumbuhan Ekonomi 	<p>Dari hasil penelitian tersebut bahwa: Belanja modal pemerintah daerah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi</p>

	35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah).		Jawa Tengah. Indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
Yunie Rahayu 2018	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Perkapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. IPM 2. PDRB Perkapita 3. Pengangguran 4. Penduduk Miskin 	Hasil regresi persamaan menunjukkan slope koefisien dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan angka -0,09 yang berarti bahwa kenaikan 1 persen angka Indeks Pembangunan Manusia akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,09 persen. Pada persamaan tersebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hubungannya negatif dan signifikan pada

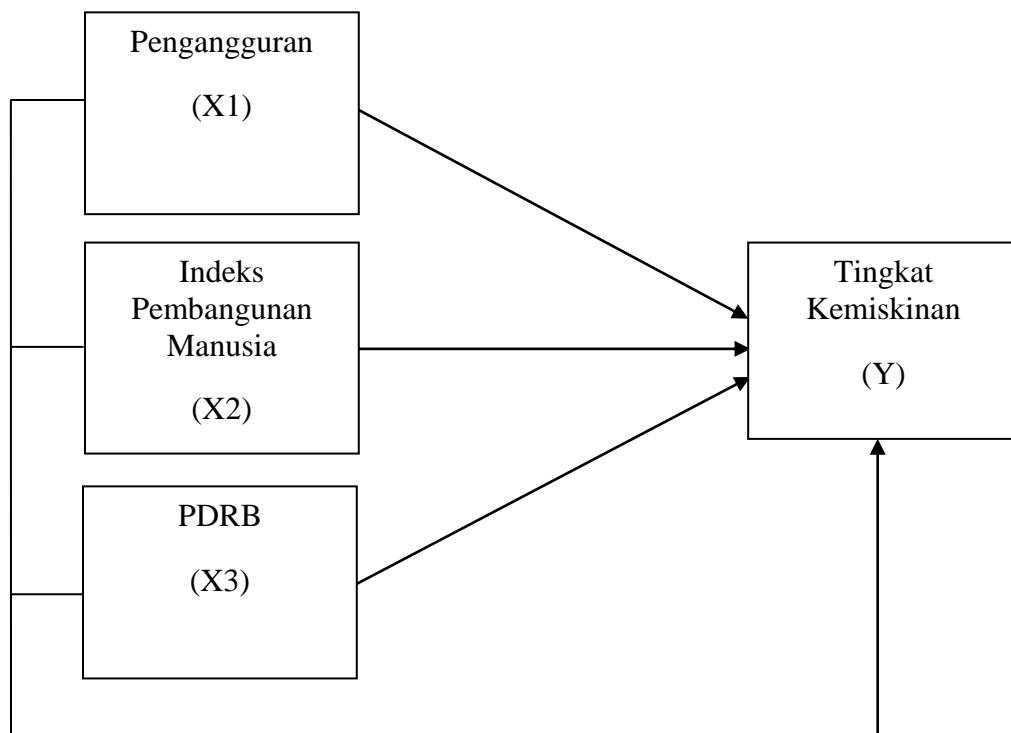
		<p>$\alpha = 5\%$. PDRB per kapita Hasil regresi persamaan menunjukkan slope koefisien dari PDRB per kapita menunjukkan angka -0.413 yang berarti bahwa kenaikan 1 persen angka PDRB per kapita akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0.413persen. Pada persamaan tersebut PDRB per kapita hubungannya negatif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$. Jumlah Pengangguran hasil regresi persamaan menunjukkan slope koefisien dari Unemployment/ Jumlah Pengangguran (U) menunjukkan angka 0, yang berarti bahwa kenaikan 1 persen angka Jumlah Pengangguran akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 2,75 persen. Pada persamaan tersebut Unemployment/ Jumlah Pengangguran(U) hubungannya positif dan</p>
--	--	---

			signifikan pada $\alpha = 5\%$.
--	--	--	----------------------------------

G. Kerangka Teoritis

Kerangka teori membahas mengenai bagaimana alur logika berjalannya variabel dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan yakni pengangguran sebagai X1, indeks pembangunan manusia sebagai X2, PDRB sebagai X3, dan tingkat kemiskinan sebagai variabel Y.

Gambar 2.2 adalah kerangka dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 3.1
Kerangka Teoritis

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah, belum jawaban yang empiris.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat membuat hipotesis sebagai berikut:

- 1) H_{01} :Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.
- 2) H_{a1} :Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.
- 3) H_{02} :IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.
 H_{a2} :IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.
- 4) H_{03} :PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.
 H_{a3} :PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.
- 5) H_{04} :Pengangguran, IPM dan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.
 H_{a4} :Pengangguran, IPM dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*(Bandung: Alfabeta, 2016), h.64

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁴⁸

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu, data-data yang diperlukan di dalam penelitian ini diperoleh dari website dan katalog Badan Pusat Statistik Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan penelitian ini dilakukan pada bulan Nopember-Januari 2019.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Iqbal Hasan data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.⁴⁹

D. Populasi dan Sampel

Menurut sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi

⁴⁸*Ibid*, h.8

⁴⁹Agus Irianto, *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta:Kencana, 2009), h.51

dalam penelitian ini adalah data Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB dan data Kemiskinan yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Labuhanbatu.

Sampel adalah bagian dari populasi itu, atau bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah data Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu pada periode tahun 2011-2017 yang telah di Interpolasi ke bentuk bulanan menjadi 84 sampel.

E. Defenisi Operasional

Menurut sugiyono defenisi operasional adalah penentuan sifat yang akan di pelajari sehingga menjadi variabel yang dapat di ukur. Dengan variabel yang mengukur sisi makna atau mengungkapkan skala pengukuran untuk masing-masing variabel.

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel penelitian, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel Independen (variabel bebas)

Menurut sugiyono variabel independen adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

a. Pengangguran (X_1)

Jumlah data pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah data pengangguran yang berada di Kabupaten Labuhanbatu data dari tahun 2011-2017 (dalam ribu jiwa).

b. Indeks Pembangunan Manusia (X_2)

Jumlah data indeks pembangunan manusia yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh indeks pembangunan manusia yang berada di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2011-2017 (dalam persen).

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_3)

Jumlah data PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah atas dasar harga berlaku dari tahun 2011-2017 (dalam juta rupiah) yang berada di Kabupaten Labuhanbatu.

2. Variabel Dependen (variabel terikat)

Menurut Sugiyono variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang akan diteliti pada penelitian ini adalah tingkat kemiskinan (Y).

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah jumlah penduduk miskin yang berada di Kabupaten Labuhanbatu data dari tahun 2011-2017 (dalam ribuan jiwa).

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah cara yang di gunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.⁵⁰ Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, dengan mencatat langsung dari Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal, buku-buku dengan cara membaca, melihat dan menulis langsung yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_a) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen hubungan positif atau negatif. Metode ini digunakan untuk setiap persamaan dalam satu sistem (model) tanpa memberikan pengaruh yang jelek pada persamaan lain dan untuk memecahkan suatu model dengan banyak persamaan.

⁵⁰Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratek*, (Jakarta:Rineka Cipta), h.197

G. Analisis Data

Untuk mendukung hasil penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan metode regresi linear berganda dan diolah dengan bantuan aplikasi *Eviews 8*. Adapun tahapan analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah (tidak terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diuji melalui uji asumsi klasik, yaitu:⁵¹

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.⁵² Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi normalitas data dilakukan dengan pengujian *Jarque Bera*.

Dalam uji ini, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah:

- a. Jika nilai signifikan >0.05 maka distribusi normal, dan
- b. Jika nilai signifikan <0.05 maka distribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada suatu tidaknya hubungan linear yang sempurna atau eksak diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Adanya multikolinieritas dapat dilihat dari *Tolerance value* atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas *Tolerance Value* 0,1 batas VIF adalah 5. Apabila *Tolerance Value* $< 0,1$

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h.171

⁵²Wing Wahyu Winarto, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews, edisi keempat* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2009), h.65

atau $VIF > 5$ maka terjadi multikolinieritas. Tetapi jika *Tolerance value* $> 0,1$ atau $VIF < 5$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghojali, uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variabel dan residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Konsekuensinya adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penakir yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun besar.

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas juga dapat diketahui dengan melakukan uji *Glejser*. Jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.⁵³

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pada periode t (tahun sekarang) dengan periode $t-1$ (tahun sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi maka dapat dideteksi dengan uji *Durbin-Watson*. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

- 1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif,
- 2) Angka D-W diantar -2 sampai $+2$ berarti tidak ada autokorelasi,
- 3) Angka D-W di atas $+2$ berarti ada autokorelasi negatif.

2. Uji Hipotesis

Uji signifikan merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel, ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis nol.

⁵³ Helmi dkk, *Analisis Data*, (Medan:USU Press, 2011), h.133

Keputusan untuk mengolah H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada. Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t), pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (uji F), dan pengujian koefisien determinasi *Goodness of fit test* (R^2).

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh tingkat kemiskinan dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (*Adjusted R2*) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu pengangguran, IPM dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan. Nilai (*Adjusted R2*) mempunyai interval antar 0 dan 1. Jika nilai *Adjusted R2* bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (*Adjusted R2*) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing – masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

b. Uji Parsial (t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata.

Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat hipotesis berikut:

$H_0 : \beta_1 = 0$ artinya tidak berpengaruh,

$H_1 : \beta_1 > 0$ artinya berpengaruh positif,

H1 : $\beta_1 < 0$ artinya berpengaruh negatif.

Dimana β_1 Koefisien variabel independen ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. Biasanya nilai β dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh variabel X1 terhadap Y.

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji f-statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui signifikan tidaknya, maka derajat signifikan yang digunakan sebesar 5% atau ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar dari pada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengambil keputusan:

Ho : $\beta = 0$ artinya, tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

Ha : $\beta >$ artinya, ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

$$F = \frac{R^2}{(1-R^2)} \frac{(n-k)}{k}$$

$$(1-R^2)(K)$$

Keterangan :

R = Koefisien korelasi berganda

K = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah sampel

Dengan tingkat signifikan (α) yang digunakan adalah 5% distribusi F dengan derajat kebebasan ($\alpha ; K-1, n-k$).

Kriteria Pengujian : $F_{hitung} < F_{tabel} =$ diterima, artinya variabel independen secara serentak atau bersamaan tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. $F_{hitung} > F_{tabel} =$ Ho ditolak, artinya variabel independen secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan

1) Model Regresi Linear

Dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model regresi berganda. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda karena variabelnya lebih dari satu atau dua. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan pengaruh variabel bebas (X_1 , X_2 dan X_3) terhadap variabel terikat (Y). Untuk memperoleh hasil yang lebih terarah, maka peneliti menggunakan bantuan perangkat lunak software Eviews 8.

Tahapan pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda ditempuh dengan langkah menentukan persamaan regresinya adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y = Kemiskinan

α = Konstanta

β_1 = Koefisien X_1

β_2 = Koefisien X_2

β_3 = Koefisien X_3

X_1 = Variabel Pengangguran

X_2 = Variabel Indeks Pembangunan Manusia

X_3 = Variabel PDRB

e = Error term

Untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat) maka menggunakan uji statistik diantaranya

BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu

Sistem Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sebelum penjajahan belanda adalah bersifat monarkhi. Kabupaten labuhanbatu adalah salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Utara. Ibu Kota Kabupaten Labuhanbatu terletak di Rantau Prapat. Kabupaten Labuhan Terkenal dengan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet. Wilayah Kabupaten yang dilalui tiga sungai besar, yaitu Sungai Bilah, Sungai Kualuh, Sungai Barumon, memiliki kondisi tanah yang subur dapat dilihat dari 58 persen wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang di dominasi subsektor pertanian.

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan pantai timur Sumatera Utara. Secara geografis, Kabupten Labuhanbatu berada pada 1041'-2044, Lintang Utara, 99033'-100022' Bujur Timur dengan Ketinggian 0 – 2.151 m diatas permukaan laut. Luas Kabupaten Labuhanbatu 256.138 Ha. Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Provinsi Sumatera Barat dan Riau, yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang menandai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

Labuhanbatu terdiri dari 9 kecamatan yaitu ; Bilah Hulu, Pangkatan, Bilah Barat, Bilah Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah, Panai Hilir, Rantau Selatan, Rantau Utara. Dengan kecamatan terluas yaitu Panai Hilir (48.374 Ha). Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 98 desa/kelurahan. Kabupaten Labuhanbatu mempunyai objek wisata yang menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke Kabupaten Labuhanbatu yaitu : Pemandian Alam Aek Pala di Kecamatan Bilah Barat, Air Terjun Linghahara di Kecamatan Rantau selatan, Aek Sirao-rao di Kecamtan Rantau Selatan, Wisata Tugu Juang 45 di kecamatan Rantau selatan. Sejak tahun 1997 penduduk perkotaan terus meningkat dengan pesat. Hal ini disebabkan proses urbanisasi yang terus menerus terjadi karena kehidupan di perkotaan

dianggap lebih baik. Kabupaten Labuhanbatu mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu 415.110 jiwa disertai dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, yakni 1,37% pertahun. Jumlah penduduk bukan hanya merupakan modal tetapi juga merupakan beban dalam pembangunan. Karena itu, pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2. Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Labuhanbatu

Kemiskinan merupakan hal yang umum yang banyak di alami oleh berbagai daerah sebagai akibat dari kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, kurangnya kepemilikan sumber daya, dan sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, menjadi penyebab kemiskinan terjadi. Berbagai penanggulangan kemiskinan sudah mulai di atasi dengan berbagai cara oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat penduduk miskin di daerah-daerah. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu selama tahun 2011 sampai 2017 dapat dilihat dari tabel 4.1.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2011-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)
2011	418.992	42610
2012	424.644	41310
2013	430.718	38140
2014	453.630	37350
2015	462.191	41630
2016	470.752	41940
2017	479.313	41980

Sumber : BPS Sumut, Labuhanbatu dalam Angka (2017)

Dari tabel 4.1 menurut Badan Pusat Statistik selama kurun waktu 2011-2014 jumlah kepadatan penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 37.350

jiwa. Memasuki tahun 2015-2017 jumlah penduduk miskin kembali meningkat sebanyak 41.980 jiwa.

3. Perkembangan Jumlah Pengangguran di Kabupaten Labuhanbatu

Pengangguran adalah dimana seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan di suatu daerah atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. pengangguran menjadi masalah yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatan yang menjadi pemicu munculnya kemiskinan. Pengangguran menjadi beban dalam perekonomian dan menjadi perhatian oleh pemerintah. Jumlah pengangguran di Kabupaten Labuhanbatu selama tahun 2011 sampai 2017 dapat di lihat dari tabel 4.2.

Tabel 4.2

**Jumlah Pengangguran di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2011-2017**

Tahun	Jumlah Pengangguran (Ribu Jiwa)
2011	11835
2012	12897
2013	17025
2014	14682
2015	20999
2016	23512
2017	24623

Sumber : BPS Sumut, Labuhanbatu dalam angka (2017)

Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2011 mencapai 11835 jiwa. Setelah memasuki tahun 2012 jumlah pengangguran mengalami kenaikan mencapai 12897 jiwa. Masuk pada tahun 2013 tetap mengalami kenaikan sebanyak 17025 jiwa, sampai ke tahun 2017 semakin meningkat sebanyak 24623 jiwa jumlah pengangguran di Kabupaten Labuhanbatu.

4. Perkembangan Jumlah Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Labuhanbatu

Indekas Pembangunan manusia dilakukakan untuk melihat potensi dan keterampilan manusia atau meningkatkan kemampuan kerja, dengan adanya pembangunan meningkatkan kualitas produktivitas dengan otomatis taraf hidupnya juga akan meningkat. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang sangat penting karena ketika manusia tinggi, produktifitas maningkat maka pendapatan pun meningkat dan dapat dikurangi. Jumlah indeks pembangunan manusia di Kabupaten Labuhanbatu selama tahun 2011 sampai 2017 dapat dilihat dari tabel 4.3.

Tabel 4.3

**Jumlah Indeks Pembangunan Manusia (%)
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011-2017**

Tahun	Jumlah Indeks Pembangunan Manusia (%)
2011	67.88
2012	68.64
2013	69.45
2014	70.06
2015	70.23
2016	70.50
2017	70.64

Sumber : BPS Sumut, Labuhanbatu dalam Angka(2017)

Dari tabel 4.3, dapat dilihat bahwa jumlah indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2011 sebanyak 67.88%. Setelah memasuki tahun 2012 IPM mengalami kenaikan sebanyak 68.64%, di tahun 2013 IPM juga masih meningkat sebanyak 69.45%, lalu di tahun 2014 IPM masih tetap mengalami kenaikan sebanyak 70.06%, di tahun 2015 jumlah IPM sebanyak 70.23% di tahun 2016 IPM juga meningkat sebanyak 70.50% sampai di tahun 2017 IPM semakin meningkat sebanyak 70.64% di Kabupaten Labuhanbatu.

5. Perkembangan Jumlah PDRB di Kabupaten Labuhanbatu

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah angka PDRB per kapita. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang. Jumlah PDRB di Kabupaten Labuhanbatu selama tahun 2011 sampai 2017 dapat dilihat dari tabel 4.4.

Tabel 4.4

Jumlah PDRB Menurut lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011-2017

Tahun	Jumlah PDRB (Juta Rupiah)
2011	16378786.3
2012	18004423.8
2013	20117620.67
2014	22176001.94
2015	24083108.12
2016	26505235.84
2017	29030570.39

Sumber : BPS Labuhan batu Dalam Angka (2017)

Dari tabel 4.4, dapat dilihat bahwa PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku di Kabupaten Labuhanbatu di tahun 2011 sampai 2015 mengalami kecenderungan yang meningkat. Di tahun 2011 PDRB sebesar 16378786.3 masih sangat rendah sedangkan di tahun 2012 PDRB naik menjadi 18004423.8, di tahun 2013 PDRB menjadi semakin meningkat sebesar 20117620.67, di tahun 2014 PDRB masih tetap meningkat menjadi 22176001.94, di tahun 2015 PDRB semakin meningkat menjadi 24083108.12, di tahun 2016 PDRB masih meningkat sebesar 26505235.84, di tahun 2017 semakin meningkat PDRB sebesar 29030570.39.

B. Uji Asumsi Klasik

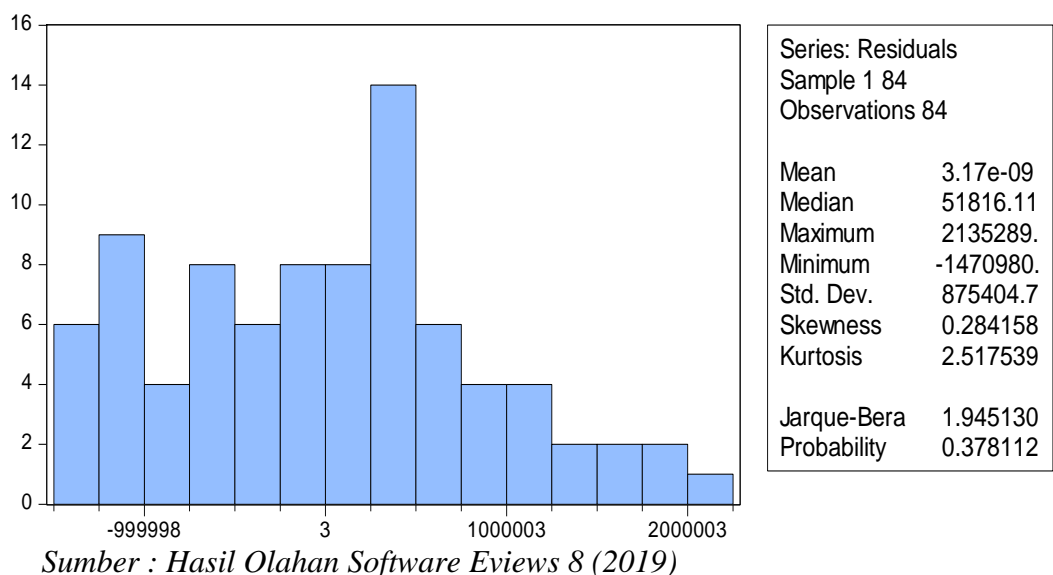
Analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah regresi linear terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Adapun uji yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji *Jarque-Bera (J-B)*. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 0,05$. Dalam uji ini, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah :

- Jika nilai signifikan > 0.05 maka distribusi normal, dan
- Jika nilai signifikan < 0.05 maka distribusi tidak normal.

Gambar 3.2. Uji Normalitas dengan Uji Jarque-Bera



Berdasarkan gambar 3.2, diketahui hasil uji normalitas residual di atas bahwa nilai *Jarque-Bera* sebesar 1,945130 dengan *p value* sebesar

0,378112 dimana $> 0,05$ yang berarti residual berdistribusi normal dalam penelitian ini.

2. Uji Multikolinieritas

Dalam penelitian ini, Uji Multikolinieritas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolienaritas antar variabel bebas. Hasil *Output Eviews* terlihat seperti pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 07/03/19 Time: 19:39
Sample: 1 84
Included observations: 84

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.42E+08	440.4771	NA
X1	0.006435	312.8720	8.04551
X2	79232.36	498.1213	7.88013
X3	9.81E+09	712.7370	4.36894

Sumber Olahan Software Eviews 8 (2019)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel bebas kurang dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam penelitian ini.

3. Uji Autokorelasi

D-W test digunakan untuk mengetahui apakah dalam model terdapat autokorelasi ataupun antara disturbance error-nya. Bentuk hipotesis dari uji *D-W* sebagai berikut:

$H_0 : \rho = 0$ berarti tidak ada autokorelasi

$H_a : \rho \neq 0$ berarti ada autokorelasi

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Dependent Variable: SER04

Method: Least Squares

Date: 07/03/19 Time: 19:39

Sample: 1 84

Included observations: 84

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28.82333	18481.95	15.59539	0.0000
X1	5.614321	0.080219	7.657997	0.0000
X2	3.773382	281.4824	13.40539	0.0000
X3	0.532185	9.91E-05	2.328206	0.0381
R-squared	0.781366	Mean dependent var		40669.94
Adjusted R-squared	0.773168	S.D. dependent var		1694.624
S.E. of regression	807.0971	Akaike info criterion		16.27121
Sum squared resid	52112460	Schwarz criterion		16.38697
Log likelihood	-679.3909	Hannan-Quinn criter.		16.31774
F-statistic	95.30302	Durbin-Watson stat		1.73445
Prob(F-statistic)	0.000000			

<i>Durbin-Watson stat</i>	1.73445
---------------------------	---------

Sumber : Hasil Olahan Software Eviews 8 (2019)

Dalam jumlah dan sampel variabel independent tertentu. Diperoleh nilai kritis DL dan DU dalam distribusi dalam durbin Watson untuk berbagai nilai α yaitu nilai DL = 1,5723 dan DU = 1,7199. Berdasarkan hasil output program eviews diperoleh nilai D-W yaitu sebesar = 1,73445. Jika nilai DW > DU dan nilai (4-DW) > DU maka dinyatakan tidak ada masalah autokorelasi baik autokorelasi positif maupun negatif . Dari hasil

olah data diatas nilai DW ($1,73445 > DU (1,7199)$) dan $4 - 1,73445 = 2,2655 > 1,7199$ artinya tidak ada masalah autokorelasi positif maupun negatif dalam penelitian ini.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear apabila uji ini tidak terpenuhi maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat *estimator*.

Tabel 4.7
Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
F-statistic	11.62849	Prob. F(3,80)	0.2987
Obs*R-squared	25.50696	Prob. Chi-Square(3)	0.2632
Scaled explained SS	22.89604	Prob. Chi-Square(3)	0.2344

Sumber Olahan Software Eviews 8 (2019)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa nilai p value yang ditunjukkan dengan nilai *Prob. Chi-Square (3)* pada *Obs* R-squared* yaitu sebesar 0,2532. Oleh karena nilai p value $0,2632 > 0,05$ maka H_0 di terima atau dengan kata lain tidak ada masalah asumsi non heteroskedastisitas.

C. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi (tidak terkontrol) uji ini kadang disebut juga sebagai “konfirmasi analisis data” uji ini selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol.

1. Uji Koefisien Determinasi (R -Square / R^2)

Dalam analisis koefisien determinasi pada analisis regresi linear berganda adalah jika hasil analisis dalam *uji F* tidak signifikan, maka nilai koefisien determinasi tidak dapat digunakan atau dipakai untuk memprediksi kontribusi pengaruh variabel X secara simultan terhadap Y.

Tabel 4.8

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

R-Square	Adjusted R-Square
0.781366	0.773168

Berdasarkan tabel 4.8 di atas bahwa dapat diperoleh nilai Adjusted R^2 sebesar 0,781366. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama mampu memberi penjelasan mengenai variabel dependen sebesar 78,13%. Adapun 21,87% lagi dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model penelitian.

2. Uji Parsial (t-test)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independen secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependen.

Tabel 4.9

Hasil Pengujian Signifikansi Parsial (Uji-t)

No	Keterangan	t-hitung	Sig
1	Pengangguran	7.657997	0.0000
2	IPM	13.40539	0.0000
3	PDRB	2.328206	0.0381

Sumber : Hasil Olahan Software Eviews 8 (2019)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dibuat suatu interpretasi model yang diambil pada metode penelitian sebagai berikut :

- a. $H_0 : b = 0$
 $H_a : b \neq 0$
- b. $\alpha = 5\% : 2 = 0.025$
 $df = n - k = 84 - 4 = 80$
 $t\text{-tabel} = 1.99006$
- c. Kriteria pengambilan keputusan :
- H_0 di tolak jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$
 H_0 di terima jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$

Berdasarkan pengolahan data dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengangguran (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu periode 2011-2017 dengan nilai $t\text{-hitung}$ lebih besar dari pada $t\text{-tabel}$ ($7.657997 > 1.99006$) maka H_0 di tolak dan H_a di terima pada $\alpha = 5\%$.
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu periode 2011-2017 dengan nilai $t\text{-hitung}$ lebih besar dari pada $t\text{-tabel}$ ($13.40539 > 1.99006$) maka H_0 di tolak dan H_a di terima pada $\alpha = 5\%$.
- 3) PDRB (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu periode 2011-2017 dengan nilai $t\text{-hitung}$ lebih besar dari pada $t\text{-tabel}$ ($2.328206 > 1.99006$) maka H_0 di tolak dan H_a di terima pada $\alpha = 5\%$.

3. Uji Simultan (*Uji Keseluruhan- F*)

Uji F-Statistik ini berguna untuk pengujian signifikan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap nilai variabel dependen. Uji ini melihat seberapa besar pengaruh variabel X_1 (Pengangguran) dan X_2 (Indeks Pembangunan Manusia), X_3 (PDRB) secara bersama-sama terhadap variabel Y (Kemiskinan) di Kabupaten Labuhanbatu.

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Signifikansi Simultan (Uji-F)

F-hitung	Sig
95.30302	0.0000

Kriteria pengambilan keputusan:

H_0 di tolak jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$

H_0 di terima jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$

a. $H_0 : b = 0$

$H_a : b \neq 0$

b. $\alpha = 5\%$

c. $N1 = k-1 = 4-1 = 3$

$N2 = n-k = 84-4 = 80$

d. $F\text{-hitung} = 95.30302$

e. $F\text{-tabel} = 2,72$

Berdasarkan hasil analisis model regresi pada tabel 4.10 dapat di ketahui bahwa $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ($95.30302 > 2,72$), maka H_0 di tolak dan H_a di terima. Artinya bahwa secara bersama-sama variabel X_1 (Pengangguran), X_2 (Indeks Pembangunan Manusia) X_3 (PDRB) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Labuhanbatu pada $\alpha = 5\%$. Dari hasil olah data kita dapat melakukan analisa dan hasil dari analisa penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Regresi Linier

Dari hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode *OLS*, dan data *time series* dapat di tarik suatu bentuk model persamaan untuk pengaruh setiap variabel terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu. Model estimasi persamaannya sebagai berikut:

$$Y = 28,82333 + 5,614321 X_1 + 3,773382 X_2 + 0,532185 X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dibuat suatu interpretasi model sebagai berikut:

- a) Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu. Dimana setiap kenaikan 1 persen maka akan mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 5,62 persen.
- b) Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu. Dimana setiap kenaikan 1 persen maka akan mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 3,78 persen.
- c) PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu. Dimana setiap kenaikan 1 persen maka akan mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 0,54 persen.

Berdasarkan model tersebut diketahui bahwa variabel pengangguran, indeks pembangunan manusia, PDRB berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.

D. Interpretasi Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel pengangguran ternyata memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2011-2017. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian. Dari hasil olah data regresi linear berganda diatas dapat diketahui bahwa pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu. Dimana setiap kenaikan 1 persen maka akan mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 5,62 persen.

Hal ini Artinya jika pengangguran naik maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu akan naik. Hal ini terjadi karena kebutuhan

masyarakat yang banyak dan beragam membuat mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal yang dilakukan adalah bekerja agar memperoleh pendapatan. pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat pengangguran tenaga kerja terpenuhi jika tidak maka akan terjadi pengangguran. Maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat semakin turun tingkat kemakmuran karena pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang kemiskinan terjadi.

Oleh sebab itu, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, Yunie Rahayu (2018) dalam penelitiannya berjudul “Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Perkapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi”. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel Indeks Pembangunan Manusia ternyata memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2011-2017. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian. Dari hasil olah data regresi linear berganda diatas dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu. Dimana setiap kenaikan 1 persen maka akan mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 3,78 persen.

Dengan masyarakat yang sehat dan berpendidikan yang baik, peningkatan produktifitas masyarakat akan meningkatkan pula pengeluaran untuk konsumsinya, ketika pengeluaran untuk konsumsi meningkat, maka tingkat kemiskinan akan menaik. Disisi lain, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Rendahnya produktivitas berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan.

Sehingga dengan tingginya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

Oleh sebab itu, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, Noor Zuhdiyaty (2017) dalam penelitiannya berjudul “Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia selama lima tahun terakhir” Dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

3. Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel Produk Domestik Regional Bruto ternyata memiliki hubungan Positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2011-2017. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian. Dari hasil olah data regresi linear berganda diatas dapat diketahui bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu. Dimana setiap kenaikan 1 persen maka akan mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 0,54 persen.

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, Rusdarti (2013) dalam penelitiannya berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah” Dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan dari hasil estimasi yang didapat, yaitu :

1. Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu. Dimana setiap kenaikan 1 persen maka akan mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 5,62 persen.
2. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu. Dimana setiap kenaikan 1 persen maka akan mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 3,78 persen.
3. PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu. Dimana setiap kenaikan 1 persen maka akan mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 0,54 persen.
4. Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.

B. Saran

1. Jumlah pengangguran berpengaruh kepada peningkatan kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu, sehingga perlu adanya penciptaan lapangan pekerjaan yang memadai bagi para tenaga kerja agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Pemerintah selayaknya memberikan pelatihan-pelatihan kepada penduduk yang usia produktif untuk bisa mandiri meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha agar memiliki penghasilan tambahan, menyerap lapangan pekerjaan,

dan akan membuat pengangguran semakin sedikit dan jumlah penduduk miskin akan berkurang.

2. Pemerintah harus lebih meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam, meningkatkan teknologi, dan mencapai daya beli masyarakat yang berpengaruh pada pendapatan masyarakat yang masih rendah. Meningkatkan pencapaian tingkat pendidikan formal masih perlu diupayakan oleh pemerintah dan upaya peningkatan dan perbaikan infrastruktur dan kesehatan dan stabilitas harga dimana aspek-aspek tersebut merupakan komponen penting dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu.
3. Masyarakat harus ikut berperan dalam upaya mengurangi kemiskinan dengan dimulai dari diri sendiri dan Masyarakat harus ikut berperan dalam partisipasi berupa kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan agar masyarakat lebih mandiri dengan mengasah keterampilan atau keahlian untuk membuka peluang usaha sendiri agar meningkatkan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Yani, Isnaini Harahap, dan Marliyah, *Analisis Tingkat Kesenjangan Pada Masyarakat Tebing Tinggi*, Medan: FEBI UINSU Press, 2015.

Arfida, Dra. BR, M.S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Akmal Tarigan Dr. H, Azhari, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi*, FEBI UINSU Press, 2016.

Bank, World, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (ikhtisar)*, Jakarta: The World Bank, 2005.

Badan Pusat Statistik (BPS), *Konsep Daerah Kabupaten Labuhanbatu*, 2017.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2004.

Bapennas, *Direktori Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Periode 1996-2001*, Jakarta.

Citra, Yogi, Pratama, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol.4 No.2 Agustus, 2014.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.

Haughton, Jonathan, *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan Handbook On proverty And Inequality*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Helmi dkk, *Analisis Data*, Medan: USU Press, 2011.

Ibrahim, Sa'ad, *Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Ilmi, Saiful, *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*, Vol.15 No.1 April, 2017.

Irianto, Agus, *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Kencana, 2009.

Kuncoro, Mudjarat, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006.

Mankiw, N. Gregory, *Makro Ekonomi Edisi Keenam*, Jakarta: Erlangga, 2006.

Nur, M. Kholis, Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an; Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, Yogyakarta: Kaukaba, 2012.

Parsudi, Suparlan, *Kemiskinan Perkotaan dan Alternatif Penanganannya Ditujukan Dalam Seminar Forum Perkotaan*, Jakarta: Prasana Wilayah, 2000.

Pujoalwanto, Basuki, *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Pohan, Aulia, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implikasinya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

P. Todaro, Michael, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh*, Jakarta: Erlangga, 2000.

Rahayu, Yunie, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Perkapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi*, *Jurnal Of Economics And Business*. Vol.2 No 1 Maret 2018.

Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi (Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Salma, Barlinti, Yeni, *Jurnal Kebijakan-Kebijakan Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, *Lex Jurnalica*, Vol.4 No.3 Agustus 2007.

Suharto, Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Dalam edisi Menggagas Model Jaminan Sosial Universal di Bidang Kesehatan*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Suaharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Suryawati, Criswardani, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, Vol 8 No.3, Edisi 11 November 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sukmaraga, Prima, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin*

di Provinsiss Jawa Tengah,Semarang:Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro,2011.

Suryana,*Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*, Jakarta: Salemba Empat,2000.

Syahwier,C.A,*Ironi Kemiskinan di Jabar.Pikiran Rakyat*,26.

Tulus,Dr,T.H.Tambunan,*Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*,Jakarta:Ghalia Indonesia,2003.

Winarto, Wing wahyu, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews, edisi keempat*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009.

Yanti,Maratade,Siske,dkk,*Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada Tahun 2002-2016)*,Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi,Vol.16 No.01 Tahun 2016.

Yaqoub,Yarlina,*Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Barat*,Jurnal EKSOS Vol.8,Nomor 3,Oktober 2012.

Zam-zam,*faktor- faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru*,Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rapidah Azmi
 Bin : Ahmad Fadhil SE
 Tempat/Tanggal Lahir : Negeri Lama, 07 Nopember 1997
 Alamat : Jln.Pembangunan Negeri Lama Kab.Labuhanbatu
 Pekerjaan : Mahasiswa
 No.Hp : 082276470870
 Asal Sekolah : SMA N 1 BILAH HILIR
 Tahun Masuk UIN SU : 2015
 Pembimbing Akademik : Dr.Isnaini Harahap MA
 Judul Skripsi : Pengaruh Jumlah Pengangguran, Indeks
 Pembangunan Manusia dan PDRB Terhadap
 Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Labuhanbatu.
 Pembimbing Skripsi I : Dr. Marliyah M, Ag
 Pembimbing Skripsi II : Nur Ahmadi Bi Rahmani M,SI
 IPK Sementara : 3,64
 Pendidikan
 SD : SD INPRES 114372 BILAH HILIR
 SMP : SMP N 1 BILAH HILIR
 SMA : SMA N 1 BILAH HILIR

Lampiran I :

Interpolasi Data Pengangguran, IPM dan PDRB 2011-2017 (Bulanan)

Tahun	Bulanan	Pengangguran (X1)	IPM (X2)	PDRB (X3)	Kemiskinan (Y)
2011	1	11835	67.88	16378786	42610
	2	11923.5	67.94333	16514256	42501.67
	3	12012	68.00667	16649726	42393.33
	4	12100.5	68.07	16785196	42285
	5	12189	68.13333	16920665	42176.67
	6	12277.5	68.19667	17056135	42068.33
	7	12366	68.26	17191605	41960
	8	12454.5	68.32333	17327075	41851.67
	9	12543	68.38667	17462545	41743.33
	10	12631.5	68.45	17598014	41635
	11	12720	68.51333	17733484	41526.67
	12	12808.5	68.57667	17868954	41418.33
2012	1	12897	68.64	18004424	41310
	2	13241	68.7075	18180524	41045.83
	3	13585	68.775	18356623	40781.67
	4	13929	68.8425	18532723	40517.5
	5	14273	68.91	18708823	40253.33
	6	14617	68.9775	18884922	39989.17
	7	14961	69.045	19061022	39725
	8	15305	69.1125	19237122	39460.83
	9	15649	69.18	19413222	39196.67
	10	15993	69.2475	19589321	38932.5
	11	16337	69.315	19765421	38668.33
	12	16681	69.3825	19441521	38404.17
2013	1	17025	69.45	20117621	38140
	2	16829.75	69.50083	20289152	38074.17
	3	16634.5	69.55167	20460684	38008.33
	4	16439.25	69.6025	20632216	37942.5
	5	16244	69.65333	20803748	37876.67
	6	16048.75	69.70417	20975280	37810.83
	7	15853.5	69.755	21146811	37745
	8	15658.25	69.80583	21318343	37679.17
	9	15463	69.85667	21489875	37613.33
	10	15267.75	69.9075	21661407	37547.5
	11	15072.5	69.95833	21832938	37481.67
	12	14877.25	70.00917	22004470	37415.83
	1	14682	70.06	22176002	37350
	2	15208.42	70.07417	22334927	37706.67

2014	3	15734.83	70.08833	22493853	38063.33
	4	16261.25	70.1025	22652778	38420
	5	16787.67	70.11667	22811704	38776.67
	6	17314.08	70.13083	22970630	39133.33
	7	17840.5	70.145	23129555	39490
	8	18366.92	70.15917	23288481	39846.67
	9	18893.33	70.17333	23447406	40203.33
	10	19419.75	70.1875	23606332	40560
	11	19946.17	70.20167	23765257	40916.67
	12	20472.58	70.21583	23924183	41273.33
2015	1	20999	70.23	24083108	41630
	2	21208.42	70.2525	24284952	41655.83
	3	21417.83	70.275	24486796	41681.67
	4	21627.25	70.2975	24688640	41707.5
	5	21836.67	70.32	24890484	41733.33
	6	22046.08	70.3425	25092328	41759.17
	7	22255.5	70.365	25294172	41785
	8	22464.92	70.3875	25496016	41810.83
	9	22674.33	70.41	25697860	41836.67
	10	22883.75	70.4325	25899704	41862.5
	11	23093.17	70.455	26101548	41888.33
	12	23302.58	70.4775	26303392	41914.17
2016	1	23512	70.5	26505236	41940
	2	23604.58	70.51167	26715680	41943.33
	3	23697.17	70.52333	26926125	41946.67
	4	23789.75	70.535	27136569	41950
	5	23882.33	70.54667	27347014	41953.33
	6	23974.92	70.55833	27557459	41956.67
	7	24067.5	70.57	27767903	41960
	8	24160.08	70.58167	27978348	41963.33
	9	24252.67	70.59333	28188792	41966.67
	10	24345.25	70.605	28399237	41970
	11	24437.83	70.61667	28609681	41973.33
	12	24530.42	70.62833	28820126	41976.67
	1	24623	70.64	29030570	41980
	2	24715.58	70.65167	29241015	41983.33
	3	24808.17	70.66333	29451459	41986.67
	4	24900.75	70.675	29661904	41990
	5	24993.33	70.68667	29872349	41993.33
2017	6	25085.92	70.69833	30082793	41996.67
	7	25178.5	70.71	30293238	42000
	8	25271.08	70.72167	30503682	42003.33
	9	25363.67	70.73333	30714127	42006.67
	10	25456.25	70.745	30924571	42010

	11	25548.83	70.75667	31135016	42013.33
	12	25641.42	70.76833	31345460	42016.67

Sumber : Hasil Olahan Data Interpolasi, Eviews 8

Lampiran III

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: SER04

Method: Least Squares

Date: 07/03/19 Time: 19:39

Sample: 1 84

Included observations: 84

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28.82333	18481.95	15.59539	0.0000
X1	5.614321	0.080219	7.657997	0.0000
X2	3.773382	281.4824	13.40539	0.0000
X3	0.532185	9.91E-05	2.328206	0.0381
R-squared	0.781366	Mean dependent var		40669.94
Adjusted R-squared	0.773168	S.D. dependent var		1694.624
S.E. of regression	807.0971	Akaike info criterion		16.27121
Sum squared resid	52112460	Schwarz criterion		16.38697
Log likelihood	-679.3909	Hannan-Quinn criter.		16.31774
F-statistic	95.30302	Durbin-Watson stat		1.73445
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran IV

Uji

Variance Inflation Factors
Date: 07/03/19 Time: 19:39
Sample: 1 84
Included observations: 84

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.42E+08	440.4771	NA
X1	0.006435	312.8720	8.04551
X2	79232.36	498.1213	7.88013
X3	9.81E+09	712.7370	4.36894

Multikolinieritas

Lampiran V

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	11.62849	Prob. F(3,80)	0.2987
Obs*R-squared	25.50696	Prob. Chi-Square(3)	0.2632
Scaled explained SS	22.89604	Prob. Chi-Square(3)	0.2344

Test Equation:

Dependent Variable: SER04

Method: Least Squares

Date: 07/03/19 Time: 19:39

Sample: 1 84

Included observations: 84

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-30028.91	9025.814	-3.327003	0.0013
X1	0.137128	0.039176	3.500312	0.2468
X2	489.2823	137.4643	3.559341	0.2336
X3	-0.000261	4.84E-05	-5.386798	0.3723

R-squared	0.303654	Mean dependent var	638.6769
Adjusted R-squared	0.277541	S.D. dependent var	463.7222
S.E. of regression	394.1526	Akaike info criterion	14.83780
Sum squared resid	12428501	Schwarz criterion	14.95355
Log likelihood	-619.1877	Hannan-Quinn criter.	14.88433
F-statistic	11.62849	Durbin-Watson stat	0.093396
Prob(F-statistic)	0.000002		

Lampiran VI**Uji Normalitas**